



Article Informations
Corresponding Email:
alfattahrezky81@gmail.com

Received: 24/06/2025; Accepted:
20/08/2025; Published: 15/10/2025

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETEGANGAN HUBUNGAN TAIWAN DAN TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN TAHUN 2021-2023

Rezky Alfattah Dwianto¹, Agus Subagyo², Angga Nurdin Rachmat³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Ketegangan hubungan Taiwan-Tiongkok berawal dari sejarah konflik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang. Perbedaan ideologi antara PKT dan Kuomintang menyebabkan terjadinya perang saudara. Konflik tersebut semakin memanas ketika Amerika Serikat ikut campur dalam ketegangan hubungan kedua negara tersebut. Ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri AS terhadap Taiwan, yaitu bantuan militer. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan "One China Policy" Amerika Serikat, yang telah lama menjadi dasar kebijakan mereka. Pada masa pemerintahan Joe Biden, berusaha untuk mengendalikan lawan-lawannya, terutama China. Oleh karena itu, selama periode Biden, fokus Amerika Serikat adalah mencegah perluasan kekuatan dan ketegangan Tiongkok melalui kerja sama militer yang lebih kuat dengan Taiwan. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori Neorealisme dan pendekatan Kebijakan Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis mendalam mengungkap bahwa keputusan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Taiwan didorong oleh kombinasi faktor Domestik dan Internasional. Faktor Internasional berupa, Menahan Agresi Kekuatan Tiongkok di Kawasan Asia, sedangkan faktor domestik yaitu adanya bantuan militer AS terhadap Taiwan.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Taiwan, Tiongkok, Militer

Abstract

The tension in Taiwan-China relations stems from the history of conflict between the Chinese Communist Party and the Chinese Nationalist Party or Kuomintang. The ideological differences between the CCP and the Kuomintang led to a civil war. The

conflict escalated when the United States intervened in the tension in relations between the two countries. This can be seen from US foreign policy towards Taiwan, namely military aid. This decision raises questions about the consistency of the United States' "One China Policy", which has long been the basis of their policies. During the Joe Biden administration, it tried to control its opponents, especially China. Therefore, during the Biden period, the United States' focus was on preventing the expansion of China's power and assertiveness through stronger military cooperation with Taiwan. This study uses the theory of Neorealism and the Foreign Policy approach. The research method used in this study is a qualitative research method because this study is descriptive and tends to use analysis. In-depth analysis reveals that the United States' decision to provide military assistance to Taiwan was driven by a combination of Domestic and International factors. International factors include, Holding Back Chinese Aggression in the Asian Region, while domestic factors include US military assistance to Taiwan.

Keyword: Foreign Policy, United States, Taiwan, China, Military

1. PENDAHULUAN

Taiwan sangat dekat dengan Tiongkok secara geografis; hanya Selat Taiwan yang membedakan keduanya. Ini menjadi salah satu alasan keduanya berselisih. Sejarah konflik antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Nasionalis Tiongkok (Kuomintang) adalah awal konflik Taiwan- Tiongkok. Ketidaksepakatan ideologis antara PKT dan Kuomintang menyebabkan perang saudara (civil war) di daratan Tiongkok. Partai komunis Mao Zedong memenangkan perang saudara dan memaksa Kuomintang dan pengikutnya pindah ke Pulau Formosa, yang kemudian dikenal sebagai Taiwan. (Yeung, 2022). Faktor utama yang menyebabkan konflik antara Tiongkok dan Taiwan adalah keengganan Presiden Tsai Ing-wen untuk menerima konsensus 1992 yang menetapkan kebijakan Satu Tiongkok atau (one china policy). Kemudian, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengakui pemerintahan Taiwan, yang menyebabkan perang sipil. (Copper, 2017).

Dalam perjalanannya, Taiwan telah tumbuh menjadi wilayah mandiri yang mengklaim bahwa dirinya terpisah dengan Tiongkok. Namun, klaim Taiwan terkait kedudukannya sebagai negara yang berbeda dengan Tiongkok terus dipertanyakan oleh banyak pihak sehingga masih banyak negara yang belum memberikan pengakuan terhadap Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui

keberadaan Taiwan sebagai anggotanya. Status Taiwan tersebut menyebabkan banyak negara hanya melakukan hubungan kerja sama dalam bidang perekonomian dan ketenagakerjaan dengan Taiwan, namun tidak di bidang diplomatic contohnya, seperti Amerika Serikat. (Leprilian, 2016).

Selama perang dingin, Amerika Serikat juga membantu Taiwan dengan mengirimkan kelompok Volunteer Amerika Serikat (Flying Tigers) dan Kelompok Angkatan Laut Sino-Amerika untuk mencegah invasi Jepang. Hal ini menandai awal persahabatan AS-Taiwan. Amerika Serikat juga membantu Taiwan untuk mencegah dominasi Komunis Tiongkok. Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Taiwan melalui komando bantuan pertahanan, armada ke-7, dan bantuan militer. Hubungan AS-Taiwan dilandasi oleh fakta pertahanan bersama yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Taiwan dari komunis dengan alasan menjaga perdamaian dunia. Setelah itu AS membuat suatu perjanjian Mutual Defense Treaty (MDT) dan Militer AS Advisory Group (MAAG) terhadap Taiwan yang berisi tidak hanya menjamin keamanan dan kelangsungan pemerintah Taiwan di Tiongkok, AS juga bertanggung jawab terhadap pertahanan Taiwan. (Goldman, 2008).

Amerika Serikat mendukung Taiwan dalam six assurance, bantuan itu berupa pertahanan militer seperti penjualan senjata. Sebenarnya, penjualan senjata AS ke Taiwan telah menyebabkan protes Tiongkok, sehingga membawa AS dan Tiongkok melakukan Joint Communique di tahun 1979. Dalam perjanjian tersebut, Tiongkok meminta agar AS menghentikan transfer senjata, tetapi AS tampaknya bersikap ambigu terhadap Tiongkok. Meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, AS melakukan kesepakatan Taiwan Relations Act (TRA), yang memberinya hak untuk melakukan transaksi pertahanan dan militer (Yeong, 2015)

Keterlibatan AS di dalam kawasan Asia menjadikan AS dapat memajukan kepentingan nasionalnya dan mendapatkan dukungan dari negara-negara kawasan lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan presiden Amerika Serikat sebelumnya, pada masa pemerintahan Joe Biden berupaya mengubah hubungan tradisional AS- Taiwan menjadi

model interaksi berbasis multilateralisme, yang dapat dikonseptualisasikan sebagai koordinasi aliansi dengan berjanji untuk berperang bersama Taiwan melawan Tiongkok jika terjadi perang. Amerika Serikat telah berfokus untuk menahan para pesaingnya, terutama Tiongkok, guna mengelola kemundurannya dan kemajuan para pesaingnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat di era Biden berupaya untuk mengekang perluasan kekuatan dan ketegasan Tiongkok melalui peningkatan kerja sama militer dengan Taiwan sebagai bagian dari kebijakan penyeimbangan dan kendali langsung atas kawasan tersebut, serta dengan melimpahkan tanggung jawab kepada negara-negara di kawasan tersebut. (Xiaode, 2022).

Keputusan presiden Amerika Serikat baik dalam era Donald Trump maupun Joe Biden memiliki sebuah kebijakan yang sama mengenai dukungan pertahanannya terhadap negara Taiwan yaitu berfokuskan untuk menghalangi dan memprovokasi agresivitas dari Tiongkok. Taiwan merupakan salah satu sekutu dari Amerika Serikat, alasan mengapa Amerika Serikat tidak ingin Taiwan jatuh kedalam genggaman Tiongkok karena jika hal tersebut terjadi maka Tiongkok akan menjadi semakin kuat dan dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa didunia. Selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan Taiwan untuk meredam kekuatan Tiongkok melalui intervensi dikawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok mengalami kemajuan yang signifikan dalam lingkup perekonomiannya. Berbagai cara Amerika Serikat lakukan untuk membuat Taiwan tidak jatuh ketangan Tiongkok, mulai dari Amerika Serikat yang membantu Taiwan untuk diakui di beberapa negara di benua Amerika, melakukan perjanjian Kerjasama baik dalam militer maupun ekonomi seperti, TRA (Taiwan Relations Act), melakukan Latihan militer Bersama di Kawasan Taiwan, serta melakukan perdagangan senjata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan neorealisme, Neorealisme merupakan salah satu paradigma arus utama yang membawa beberapa pemahaman baru terkait etika internasional yang berbeda dari paradigma realisme. bahwa status quo merupakan kondisi yang

sesungguhnya tidak ada. Hal ini dikarenakan semua negara akan berlomba – lomba untuk menjadi hegemoni atau satu – satunya kekuatan yang ada. Menurut Mersheimer terdapat 3 faktor negara menjadi hegemoni. Factor pertama, yang memengaruhi Gerakan setiap negara adalah tidak adanya pemerintah diatas pemerintah atau Lembaga yang menjamin kemanan sebuah negara. Factor kedua, setiap negara mempunyai kekuatan militer yang digunakan untuk mengancam negara lain. Factor ketiga, tidak adak satupun negara yang mengetahui tujuan atau intensi negara lain. (Mersheimer, 2001).

Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri, yang merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari seperangkat nilai, usaha pencapaian tujuan, serta keputusan dan tindakan negara dalam konteks hubungan antar bangsa (Mark Webber, 2002). Menurut KJ Holsti kebijakan luar negeri merupakan dibagi menjadi dua faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu faktor eksternal dan internal. Pada faktor internal Amerika Serikat melanjutkan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Donald Trump yaitu dengan adanya bantuan militer dan persenjataan ke Taiwan, hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonominya. Pada faktor eksternal Amerika Serikat tidak ingin Taiwan menjadi bagian dari Tiongkok, alasan mengapa Amerika Serikat tidak ingin Taiwan jatuh kedalam genggaman Tiongkok karena jika hal tersebut terjadi maka Tiongkok akan menjadi semakin kuat dan dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa didunia.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif karena bersifat deskriptif. Menurut John W. Creswell (2016) dalam bukunya "Research Design," metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti pengumpulan data dari partisipan, analisis data dari tema khusus menuju tema umum, serta interpretasi dan penjelasan makna data yang diperoleh.

Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna dari data atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan menggambarkan isu yang diteliti, serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok pada masa pemerintahan Joe Biden tahun 2021-2023

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden

Setelah pemilihan presiden AS Joe Biden, strategi AS untuk melemahkan Tiongkok diperparah dengan kembali menerapkan kebijakan multilateralisme di beberapa bidang. Meskipun AS bekerja sama dengan Tiongkok dalam bidang seperti perdagangan dan perubahan iklim, persaingan geopolitik Tiongkok dengan Taiwan meningkat setelah pemerintahan Biden menerapkan multilateralisme. Selain itu, pemerintahan Joe Biden melarang perusahaan teknologi AS yang menerima dana funeral sebesar USD50 miliar untuk membangun industri semi konduktor lokal di AS untuk membangun fasilitas teknologi canggih selama 10 tahun di Tiongkok. (Nora Maher, 2023) Dalam pemerintahan Joe Biden juga telah mengambil pendekatan serupa, yaitu dengan melanjutkan penjualan senjata dan menegaskan keputusan pemerintahan Trump untuk mengizinkan pejabat AS bertemu lebih bebas dengan pejabat Taiwan. Joe Biden adalah presiden AS pertama yang mengundang perwakilan Taiwan untuk menghadiri pelantikan presiden. Amerika Serikat berpartisipasi dalam pelatihan militer dan dialog dengan Taiwan, secara teratur melayarkan kapal melalui Selat Taiwan untuk menunjukkan kehadiran militernya di kawasan tersebut, dan telah mendorong Taiwan untuk meningkatkan anggaran pertahanannya. (Mayland, 2024) ada beberapa kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Joe Biden terhadap ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok.

Tiongkok Taiwan Policy Act 2022

Taiwan Policy Act of 2022 adalah suatu undang-undang yang disahkan oleh Komite Senat tentang Hubungan Luar Negeri di Amerika Serikat. Dalam Taiwan Policy Act juga dijelaskan bahwa AS akan memberikan dukungan yang lebih besar bagi pengaruh internasional Taiwan. AS mendukung keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional yang tidak mengharuskan adanya status kenegaraan. Pada saat yang sama, AS mendorong partisipasi Taiwan yang berarti dalam organisasi yang tidak memungkinkannya untuk menjadi anggota. Taiwan dan Amerika Serikat merupakan anggota beberapa organisasi dan badan internasional, termasuk World Trade Organization (WTO), the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, dan the Asian Development Bank. (Charles Chan Hung Wu. 2022)

Selain itu, Taiwan Policy Act 2022, juga memiliki dampak besar pada hubungan lintas selat dan Asia-Pasifik. Pertama, undang-undang tersebut telah meningkatkan kemampuan Taiwan untuk melakukan perang asimetris dengan Tiongkok. Undang-undang tersebut mengikat Taiwan hanya kepada AS untuk pembelian militer, membatasi transfer tunai untuk pembelian militer independen atau pembelian militer, dan memberikan pinjaman tambahan sebesar US\$2 miliar kepada Taiwan untuk meningkatkan kemampuan berperang selama empat tahun. (Charles Chan Hung Wu. 2022)

Taiwan Peace through Strength Act of 2023

Taiwan Peace through Strength Act of 2023 adalah undang-undang yang disetujui oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk meningkatkan dukungan AS untuk Taiwan. Anggota Kongres Jim Banks, dengan anggota Kongres Chris Pappas sebagai ketua bersama, memperkenalkan RUU ini kepada Dewan Perwakilan Amerika Serikat, dan Senator Marco Rubio memperkenalkannya sebagai perwakilan Senat. Komponen utama undang-undang tersebut meliputi: Mempercepat dan memprioritaskan penjualan militer AS ke Taiwan; Memperjelas kewenangan AS untuk mempersenjatai

Taiwan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan; Menetapkan latihan gabungan AS-Taiwan, pelatihan, dan pertukaran

profesional secara berkala; Menetapkan Dana Akuisisi Amunisi Kritis Taiwan, dan; Mengajukan kewenangan kapasitas produksi amunisi Ukraina ke Taiwan. (Banks, 2023)

Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden terhadap ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok

Faktor Internasional

Faktor internasional memiliki peran yang signifikan dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor ini mencakup dinamika hubungan antarnegara, situasi global, dan pengaruh aktor-aktor internasional. Dalam studi kasus kebijakan AS pada masa pemerintahan Joe Biden terkait ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok, peneliti menemukan faktor internasional yang mendorong Pemerintah AS pada masa pemerintahan Joe Biden, yaitu sebagai berikut:

Menahan Agresi Kekuatan Tiongkok di Kawasan Asia

Dalam kebijakan Joe Biden sendiri AS sudah dijelaskan bahwa Presiden Joe Biden akan terus mendukung Taiwan, dalam pernyataan publiknya, Biden menyatakan akan melindungi Taiwan secara militer jika terjadi perang dengan Tiongkok. Dalam wawancara CBS yang disiarkan di televisi, ketika ditanya apakah AS bermaksud membela Taiwan jika terjadi serangan Tiongkok, presiden menjawab: "Yes, if in fact there was an unprecedented attack". (Brunnstrom, D., and Hunnicutt, T. 2022). Untuk menahan kekuatan militer Tiongkok yang terus meningkat, AS telah mempersempit aliansi dan kolaborasi di sepanjang tepi Indo-Pasifik sebagai akibat dari persaingan kebijakan dan praktik AS-Tiongkok atas Taiwan. Dengan ketergantungan militer Taiwan pada AS dan kemampuan militer Beijing yang meningkat, diperlukan pengekanan terhadap kemungkinan konflik di Taiwan.

Ketidakamanan di Taiwan semakin meningkat sebagai akibat dari profil ekonomi dan militer Tiongkok yang meningkat. Taiwan telah bergabung dengan AS tanpa memiliki senjata nuklirnya sendiri, dan bergantung pada kehadiran militer AS untuk mencegah rencana ekspansionis Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dengan mempertaruhkan taruhannya pada AS untuk melawan Tiongkok, AS lebih mengejar pencegahan daripada diplomasi untuk mencegah Beijing dari penyatuan paksa. Akibatnya, Taiwan berkolaborasi dengan AS untuk mengurangi tantangan hubungan lintas selat selama eskalasi krisis.

Faktor Domestik

Terdapat beberapa faktor domestik yang mempengaruhi pengambilan keputusan Amerika Serikat di era Joe Biden terkait ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok. Faktor tersebut ialah sebagai berikut:

Amerika Serikat memanfaatkan Taiwan dengan menjual Senjata dalam kepentingannya

Pada masa periode kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat melakukan serangkaian penjualan alat-alat militer kepada negara Taiwan. Penjualan yang diusulkan ini konsisten dengan hukum dan kebijakan Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Publik 96-8. Penjualan tersebut bertujuan untuk kepentingan nasional seperti dalam bidang keamanan maupun ekonomi. Amerika Serikat juga mensupport kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan mengupgrade angkatan bersenjata. Penjualan yang diberikan dapat membantu keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. (Sumeera Imran. 2024)

Dengan penjualan senjata api ini, Amerika Serikat akan terus memanfaatkannya sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Setelah Taiwan melepaskan diri dari China, ia membutuhkan bantuan fisik untuk melindungi wilayahnya dari ancaman China dan bantuan militer, seperti peralatan militer canggih untuk melawan dan menahan ancaman dari China. Amerika Serikat memanfaatkan keadaan dan

situasi Taiwan saat itu untuk mencapai tujuannya, yang jelas menguntungkan AS. Dan kerjasama dengan Taiwan digunakan AS untuk

mengakomodir kepentingan nasionalnya, baik dari segi ekonomi maupun politik dan keamanan.

Bantuan militer AS terhadap Taiwan dalam menangani konflik dengan Tiongkok

Selain penjualan senjata, terdapat kebijakan lain di era Joe Biden ini terhadap Taiwan yaitu, adanya bantuan militer terhadap Taiwan. Presiden Joe Biden menyetujui undang – undang Taiwan Relation Act 2022, dan Taiwan Peace through Strength Act of 2023. Undang-undang yang mengikat Taiwan hanya kepada AS untuk pembelian militer, membatasi transfer tunai untuk pembelian militer independen atau pembelian militer, dan memberikan pinjaman tambahan sebesar US\$2 miliar kepada Taiwan untuk meningkatkan kemampuan berperang selama empat tahun. Selain undang undang pemerintahan Joe Biden juga mengeluarkan menyetujui paket bantuan senjata senilai \$345 juta pada Agustus 2023. Bantuan ini diberikan di bawah program Foreign Military Financing (FMF), yang biasanya mendukung negara- negara berdaulat. Dalam program bantuan ini, hibah resmi sebesar \$2 miliar untuk tahun fiskal 2023–2027 dan pinjaman pembiayaan militer sebesar maksimal \$2 miliar. (Defny, 2024).

3. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap konflik Taiwan dan Tiongkok, maka penulis akan mengemukakan hal yang dapat disimpulkan. Berangkat dari pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana Kebijakan Luar Negeri AS di era Joe Biden dalam upaya membantu Taiwan dalam konflik nya dengan Tiongkok tahun 2021-2023. Sebagai salah satu negara superpower keputusan Amerika Serikat di era Joe Biden ini memberikan bantuan militer kepada Taiwan didorong oleh kombinasi faktor internasional dan domestik yang kompleks. Meningkatnya ketegangan di

Asia-Pasifik, khususnya terkait kebijakan ekspansionis Tiongkok, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan Amerika Serikat.

Pemerintah AS di era Joe Biden mempertimbangkan faktor-faktor secara rasional sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan terhadap Taiwan. Faktor tersebut terdiri dari faktor internasional dan juga faktor domestik. Faktor internasional dalam pengambilan kebijakan Joe Biden terhadap Taiwan ialah untuk menahan agresi Tiongkok dikawasan Asia Sedangkan faktor domestiknya ialah AS memberikan bantuan militer kepada Taiwan dan memberikan penjualan senjata kepada Taiwan yang bertujuan untuk menahan Tiongkok, dan mencegah akan adanya invasi Tiongkok. Hal ini terpapar jelas bahwa dengan adanya penjualan senjata dan bantuan militer yang dilakukan oleh AS bertujuan untuk menjaga hubungannya dengan Taiwan dan juga memberikan keamanan terhadap Taiwan agar tidak terjadi konflik dengan Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, Jim. 2023. "REP. BANKS INTRODUCES TAIWAN PEACE THROUGH STRENGTH ACT" United States Congressman Jim Banks, diakses di <https://banks.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=2192>

Brunnstrom, D., and Hunnicutt, T. 2022. Biden Says U.S. Forces would Defend Taiwan in the Event of a Chinese Invasion. Reuters. diakses di <https://www.reuters.com/world/biden-says-us-forces-would-defend-taiwan-event-chinese-invasion-2022-09-18>

Charles Chan Hung Wu. 2022. "The Taiwan Policy Act and the Future of U.S.-Taiwan Relations". Stimson. Diakses di <https://www.stimson.org/2022/the-taiwan-policy-act-and-the-future-of-u-s-taiwan-relations/>

Copper, J. F. (2017). Understanding President Trump's Taiwan Policy.

American Journal of Chinese Studies, 24(2), v–viii.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approach Second Edition*. California : Sage Publication, 2007.

Goldman, L. (2008). “Mutual Defense Treaty Between The united State and The Republic of Tiongkok.” Diakses di https://avalon.law.yale.edu/20th_century/chin001.asp

K.J. Holsti, “International Politics: A Framework for Analysis, 6th Edition,” New Jersey: Prentice Hall, 1992,

Leprilian, Y. (2016). “IMPLIKASI KEBIJAKAN ONE CHINA POLICY TERHADAP KEAMANAN TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN PERIODE TAHUN 2010-2014.” *Journal of International Relations*, 2(3), 75–83

Mark Webber and Michael Smith, “Foreign Policy in Transformed World, Prentice Hall, London”, 2002, hal.11-12

Mersheimer. “The tragedy great power politic”. (New York; W.W. Norton & Co, 2001) Hal 3

Nora Maher. 2023. “US–China policy amid a persistent strategy: is conflict over Taiwan inevitable?”. *Review of Economic and Political Science*.

Sumeera Imran. 2024. “ANALYZING BIDEN'S APPROACH TO TAIWAN:

PATTERNS OF CONTINUITY AND CHANGE”. National Defence University, Islamabad, Pakistan

Xiaode Ye. 2022. “Alliance Coordination: Explaining the Logic of Biden's Taiwan Policy†”. *Pacific Focus*. 37(3).

Yeong-kuang Ger. 2015. "Cross-Strait Relations and the Taiwan Relations Act". American Journal of Chinese Studies. Vol 22, Special Issue II.

Yeung, J., Gan, N., & Jiang, S. (2022). "What you need to know about China Taiwan tensions." Diakses di

<https://Edition.Cnn.Com/2022/05/24/china/china-taiwan-conflict-explainer-intlhnk/index.htm>